

STUDI MODEL KELEMBAGAAN DALAM SISTEM AGRIBISNIS KARET

Study of Institution Model in Rubber Agribusiness System

Abdul Muis Hasibuan, Dewi Listyati dan Diby Pranowo

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
Jl. Raya Pakuwon – Parungkuda km. 2 Sukabumi, 43357
Telp. (0266) 7070941, Faks. (0266) 6542087
muis_hsb@yahoo.com

ABSTRAK

Karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia dari subsektor perkebunan yang sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam agribisnis karet adalah lemahnya sistem kelembagaan. Kelembagaan dalam agribisnis karet memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan agribisnis karet terutama dalam upaya peningkatan taraf hidup petani. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui model-model kelembagaan yang dapat diterapkan untuk pengembangan agribisnis karet. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mempererat interaksi antar subsistem dalam sistem agribisnis karet adalah dengan pola kemitraan sehingga aktivitas dari masing-masing pelaku yang ada dalam sistem agribisnis karet mengarah kepada “simbiosis mutualisme”, seperti yang tertuang dalam model agroestate dan koperasi petani. Selain itu, dinamika yang terjadi dalam kelembagaan harus ditata dengan baik agar setiap pelaku dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga tujuan kelembagaan dalam sistem agribisnis karet dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Kata kunci: karet, kelembagaan, sistem agribisnis, agroestate, model

ABSTRACT

Rubber is one of the Indonesian export commodity of estate crops mostly cultivated by smallholder plantations. One of the problems that occur in the rubber agribusiness was weak institutional system. Institutional system in rubber agribusiness played a very important in the development of rubber agribusiness especially in improving the living standard of farmers. This paper aimed to determine the institutional models that can be applied to the development of rubber agribusiness. One of the efforts that can be done to strengthening the interaction between the subsystems in rubber agribusiness system was partnerships pattern, so the activity of each of the actors in the rubber agribusiness system leads to "mutualism symbiosis", as in the model agro-estate and farmer cooperatives . In addition, the institutional dynamics that occur in the well should be laid out so that each actor can act in accordance with their respective functions so that institutional objectives in the rubber agribusiness system can be achieved effectively and efficiently.

Keywords: Rubber, institution, agribusiness system, agro-estate, model

PENDAHULUAN

Karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia dari subsektor perkebunan. Pada tahun 2011, ekspor karet Indonesia mencapai 2,55 juta ton dengan nilai lebih dari US\$ 11,76 juta. Jumlah ekspor tersebut menyumbang 30,73 persen dari total ekspor karet alam dunia yang mencapai 8.32 juta ton yang menempatkan Indonesia sebagai eksportir terbesar kedua setelah Thailand dengan volume ekspor sebesar 2,99 juta ton (Intracen, 2012). Hal tersebut mengindikasikan

bahwa peranan Indonesia dalam pasar karet dunia sangat penting.

Ditinjau dari sisi produksi, Indonesia juga merupakan produsen kedua terbesar di dunia setelah Thailand. Pada tahun 2010, produksi karet Indonesia mencapai 2,58 juta ton dengan luas areal lebih dari 3,44 juta ha (Ditjenbun, 2012). Dari luas areal tersebut, 85,17 persen diantaranya diusahakan oleh perkebunan rakyat, sedangkan 7,95 persen diusahakan oleh perkebunan besar swasta (PBS) dan 6,87 persen diusahakan oleh perkebunan negara (PBN). Namun demikian, perkebunan rakyat hanya mampu menyumbang

79,67 persen dari total produksi nasional, sedangkan PBS mampu menyumbang sebesar 10,58 persen dan PBN sebesar 10,58 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih sangat rendah, sehingga perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan.

Goenadi, et al., (2007) menyebutkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi petani adalah adanya keterbatasan modal, baik untuk membeli bibit unggul maupun sarana produksi lainnya seperti pupuk dan herbisida, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas perkebunan rakyat. Di samping itu, ketersediaan sarana-sarana produksi tersebut di tingkat petani juga masih sangat terbatas. Lebih lanjut, Burhansyah dan Azri (2008) menyebutkan bahwa permasalahan perkebunan karet rakyat ditandai oleh (i) pengusaha yang masih bersifat tradisional dengan populasi tanaman yang padat dan minim pemupukan; (ii) luas lahan rata-rata yang dimiliki oleh petani belum memenuhi skala ekonomis; (iii) penggunaan sarana produksi yang masih terbatas; (iv) pengetahuan petani mengenai budidaya karet masing rendah; dan (v) lemahnya kelembagaan.

Kelembagaan dalam agribisnis karet memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan agribisnis karet terutama dalam upaya peningkatan taraf hidup petani. Di sisi lain, karet sebagai komoditas industri memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sektor - sektor lain terutama sektor industri dan perdagangan yang mengharuskan adanya integrasi yang kuat antar sektor tersebut. Untuk itu, keberadaan kelembagaan yang kuat serta dinamika yang terjadi dalam sistem agribisnis karet terutama yang melibatkan perkebunan rakyat menjadi sangat penting dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada terutama dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani karet.

MODEL KELEMBAGAAN KEMITRAAN PERKEBUNAN KARET

Dalam sistem agribisnis karet yang berjalan pada saat ini, kelembagaan yang menunjang kegiatan agribisnis karet pada dasarnya sudah ada. Namun, kelembagaan tersebut mungkin tidak berjalan, berjalan namun tidak efektif, tidak ekonomis ataupun tidak adil bagi sebagian pihak yang terlibat dalam kelembagaan tersebut (Syahyuti, 2004).

Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan revitalisasi atau pembaruan terhadap kelembagaan-kelembagaan yang ada tersebut sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan dari kelembagaan itu sendiri. Syahyuti (2004) juga menyebutkan bahwa untuk mengembangkan kelembagaan, khususnya di dunia pertanian termasuk subsektor perkebunan seperti komoditas karet, perlu memperhatikan berbagai aspek seperti: (i) dibutuhkan iklim karo yang “sadar kelembagaan” dimana setiap individu selalu terikat kepada kelembagaan yang merupakan wadah beraktivitas setiap manusia; (ii) objeknya adalah kelembagaan, bukan individu karena kelembagaan secara fungsional menghidupkan sistem sosial; (iii) membangun kelembagaan baru; (iv) menggunakan dan memperkuat modal sosial yang berisikan kepercayaan (trust), norma yang dijalankan serta jaringan sosial (social network); dan (v) memperbaiki kelembagaan yang rusak.

Berbagai model kelembagaan yang ada pada sistem agribisnis karet pada saat ini tentu memiliki karakteristik masing-masing yang diakibatkan oleh perbedaan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, budaya, alam, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa konsep model kelembagaan yang disarankan oleh pakar/peneliti yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan seperti petani karet. Dalam makalah ini disampaikan beberapa model kelembagaan agribisnis karet berbasis kemitraan.

1. Model AgroEstate Berbasis Karet

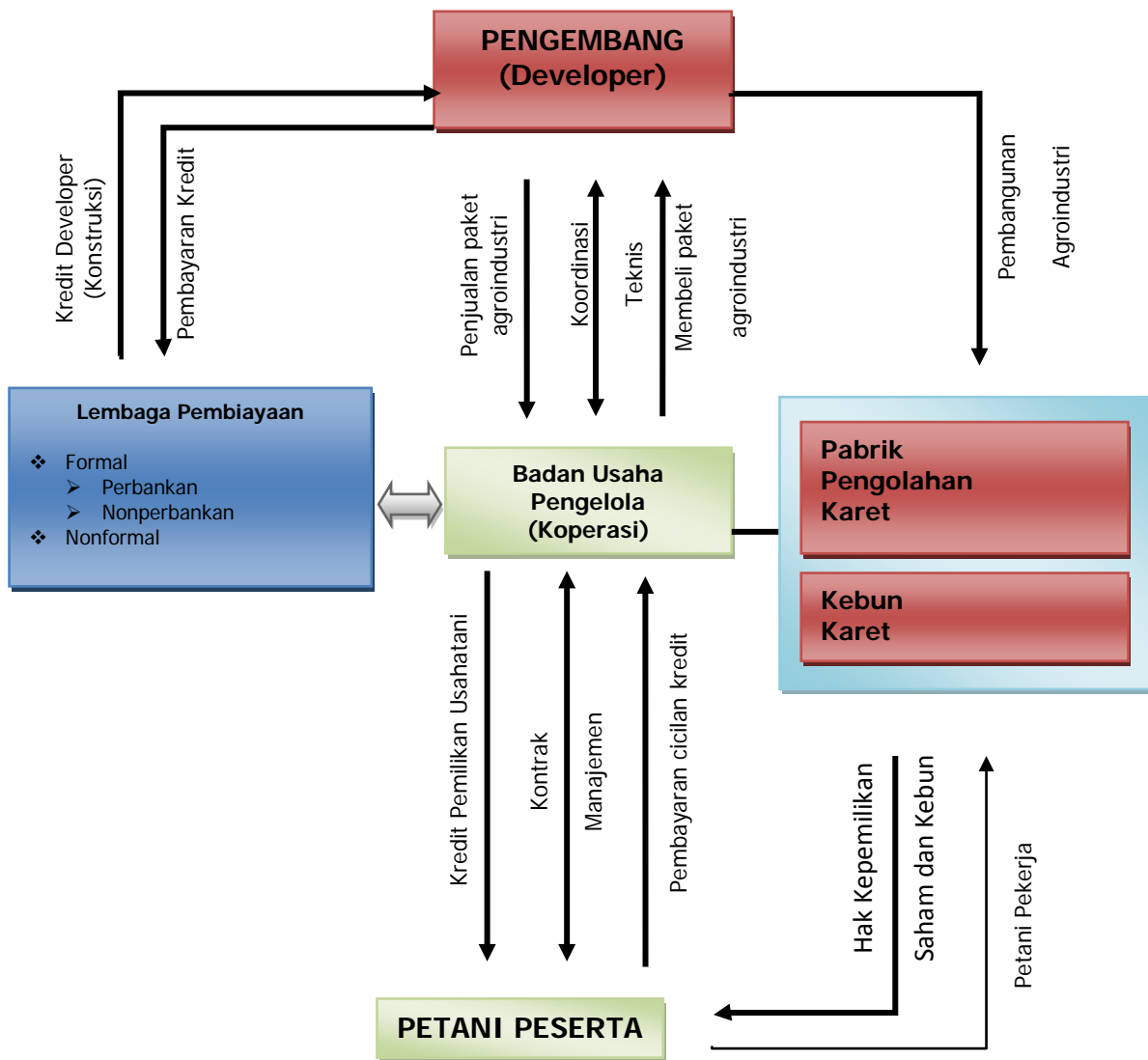
Sebagai komoditas industri, aktivitas usahatani karet memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan industri pengolahan karet. Untuk mencapai agroindustri yang sehat, jaminan ketersediaan bahan baku, baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas menjadi sangat penting dan merupakan suatu keharusan (Syahza, 2012). Model agroestate berbasis karet diadaptasi dari model umum agroestate berbasis perkebunan yang dibangun oleh Syahza (2007). Model tersebut dirancang untuk pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis pertanian (perkebunan karet). Dalam rancangannya, Syahza (2007) menyebutkan terdapat dua kegiatan bisnis utama, yaitu: (i) pembangunan kebun karet, pabrik pengolahan oleh perusahaan pengembang, dan (ii) pengelolaan kebun dan pabrik milik petani peserta melalui koperasi yang dibentuk oleh

petani peserta itu sendiri. Model agroestate berbasis karet yang dirancang adalah sebagai berikut (Gambar 1):

Dalam konsep agroestate, peran dari masing-masing pelaku yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pengembang (developer) berperan dalam membangun perkebunan karet dan pabrik pengolahan karet sampai kebun tersebut menghasilkan dan pabrik pengolahan siap untuk dioperasikan dengan menggunakan dana sendiri atau melalui pinjaman dari lembaga keuangan, baik formal maupun non formal.
2. Kebun dan pabrik pengolahan dijual oleh perusahaan pengembang kepada petani aktif yang benar-benar berminat

untuk mengelolanya dalam bentuk kavling dan saham kepemilikan pabrik. Bukti kepemilikan oleh petani berupa sertifikat kepemilikan tanah dan saham kepemilikan pabrik. Petani dapat membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit dari lembaga-lembaga pembiayaan yang ada yang difasilitasi oleh perusahaan pengembang atau koperasi. Petani pemilik kebun dan pabrik menyerahkan pengelolaan (manajemen) kepada perusahaan jasa manajemen dalam mengelola kebun dan pabrik sehingga manajemen perkebunan dan pabrik dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional.



Gambar 1. Skema model agroestate berbasis karet di pedesaan
 Figure 1. Rubber based agro-estate model scheme in rural area
 (Sumber: Syahza, 2007)

3. Kepemilikan saham pabrik pengolahan karet oleh petani dibatasi maksimum 40 persen, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan pemerintah daerah untuk menjaga profesionalisme pengelolaan pabrik. Skema model kepemilikan saham disajikan pada Gambar 2.
4. Pengelolaan kebun karet oleh petani dikelompokkan menjadi kelompok petani hamparan dan petani menjadi tenaga kerja dengan memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan dalam kelompok tersebut.
5. Perusahaan pengembang akan mengembalikan modal yang dipakai dan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun.

Dengan model agroestate berbasis karet, pendapatan petani dapat bersumber dari hasil panen kebun yang dimilikinya, upah kerja dan dividen saham pabrik sehingga diharapkan pendapatan petani cukup tinggi. Model tersebut sangat sesuai untuk petani-petani yang tidak memiliki lahan untuk perkebunan karet. Untuk petani yang sudah memiliki lahan perkebunan karet, namun tidak memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dapat dilakukan dengan model agroestate berbasis karet dengan pola kemitraan. Dengan pola ini diharapkan petani dapat menerapkan teknologi budidaya anjuran dengan baik serta meningkatkan taraf hidup petani melalui peningkatan pendapatan. Syahza (2012) menyebutkan dengan menggunakan pola kemitraan, peran masing-masing pelaku yang terlibat dalam agroestate adalah sebagai berikut:

1. Petani peserta agroestate adalah penduduk setempat yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun plasma atau yang belum dan sudah menjadi anggota koperasi.
2. Persiapan dan penetapan calon petani peserta dilakukan oleh pengurus koperasi diketahui kepala desa sebagai dasar pengesahan oleh Bupati.
3. Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan kebun sebagai tenaga kerja.
4. Petani peserta mendapat hak berupa kebun (usahatani) dengan luas sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan

antara petani dengan koperasi dan perusahaan inti.

5. Petani peserta menerima hasil penjualan komoditi setelah dipotong cicilan kredit dan kewajiban terhadap koperasi.
6. Petani peserta menerima sertifikat hak milik atas kebun setelah lunas kredit.
7. Petani berhak meminta pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan kebun kepada pengurus koperasi melalui rapat anggota.
8. Para petani peserta harus patuh dan taat terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan kebun model agroestate.
9. Petani berhak memperoleh kesempatan untuk membeli saham di industri yang dibangun oleh perusahaan inti.

2. Model Kelembagaan Karet Berbasis Koperasi Agribisnis

Selain model agroestate berbasis karet, Syahza (2012) juga mengembangkan model kelembagaan perkebunan melalui koperasi agribisnis. Model tersebut juga dapat diadaptasi sebagai model kelembagaan untuk komoditas karet. Adapun hal yang mendasari konsep tersebut adalah adanya keterkaitan yang sangat erat antara aktivitas-aktivitas yang terjadi pada seluruh subsistem yang ada dalam sistem agribisnis karet, mulai dari hulu, on farm, hilir dan subsistem penunjang. Keterkaitan antar subsistem tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan agribisnis karet di masyarakat. Agar setiap subsistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing serta saling mendukung dan menunjang peran masing-masing subsistem, maka pola koperasi agribisnis dapat dijadikan sebagai suatu solusi. Rancangan model kelembagaan karet berbasis koperasi agribisnis yang diadaptasi dari model yang dikembangkan oleh Syahza (2012) disajikan pada Gambar 3.

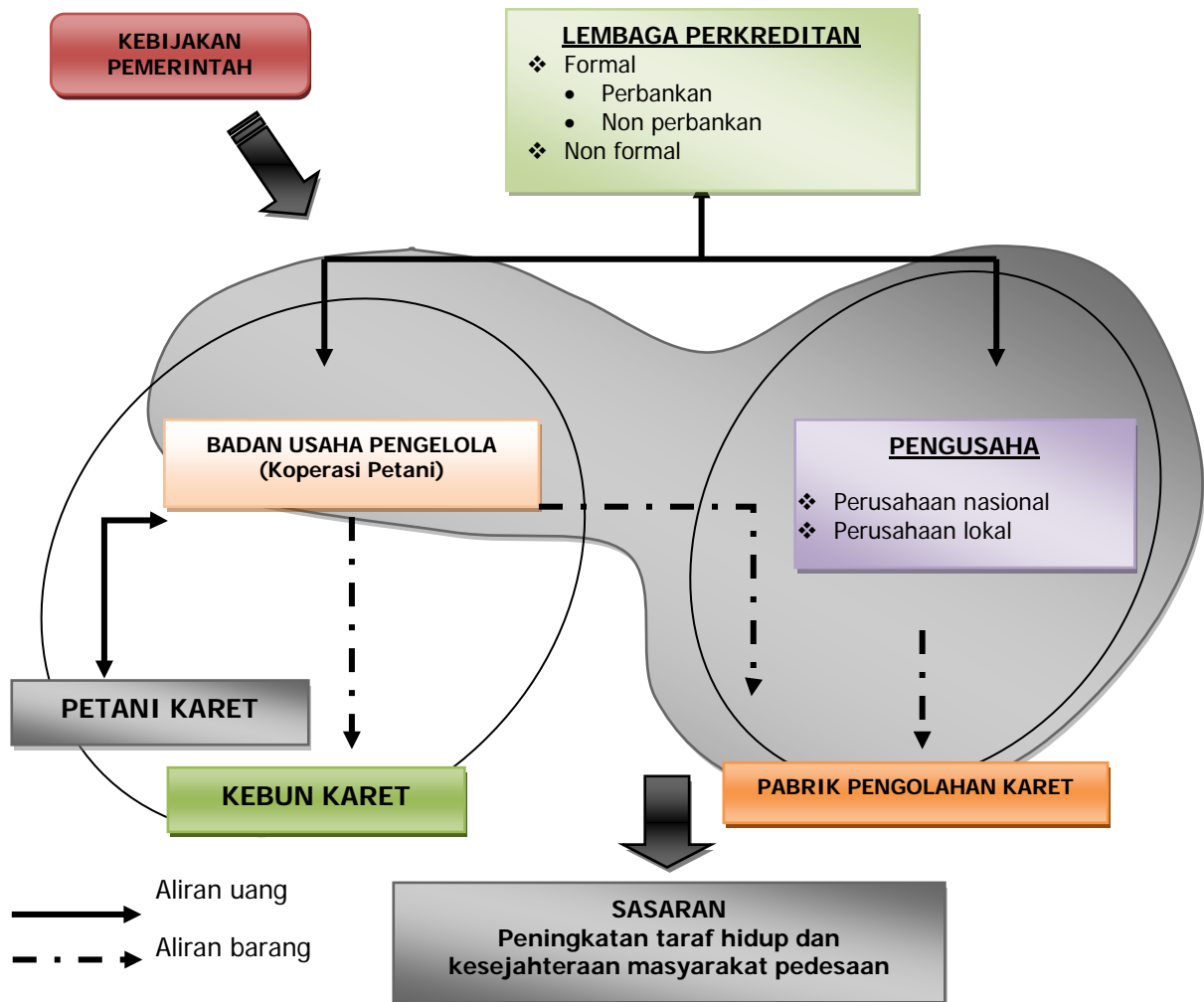
Peran dari masing-masing pelaku yang terlibat dalam sistem adalah sebagai berikut:

1. Peran Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian sangat memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Peran PT ini memiliki tiga dimensi kekuatan. Dimensi pertama PT harus dapat menggali potensi wilayah sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya

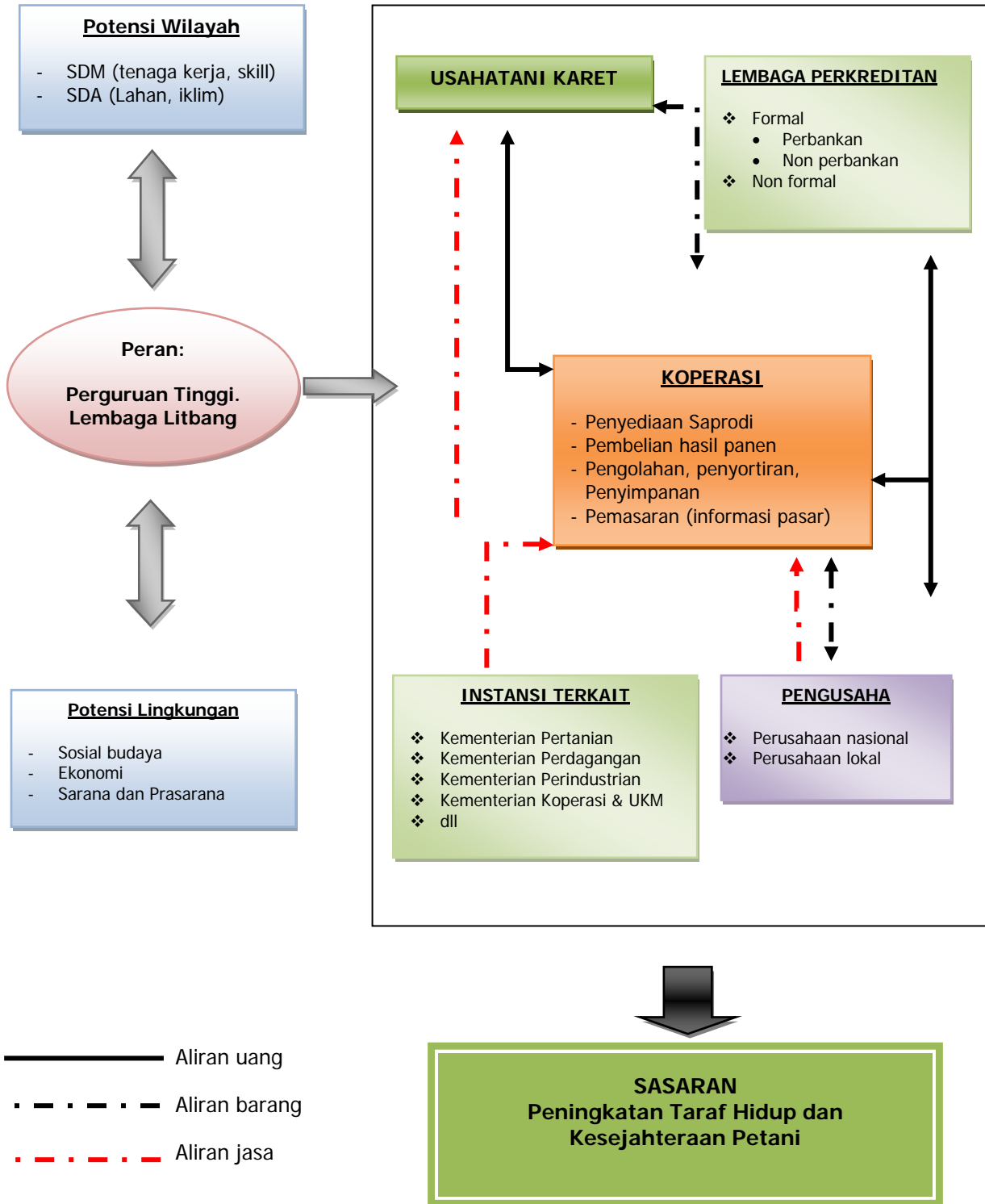
- alam (SDA) termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan serta komoditi unggulan daerah. Dimensi kedua mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana. Dimensi ketiga merupakan perumusan rekomendasi dari perpaduan dimensi pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis. Disamping itu sebagai lembaga independen, PT merupakan lembaga pemantau kegiatan agribisnis di pedesaan.
2. Pengusaha. Pengusaha yang dimaksud adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat/mesin pertanian, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan agribisnis di pedesaan. Fungsinya sebagai

pedagang adalah penyalur produk pertanian yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, swalayan, restoran, hotel, atau pasar tradisional. Dari sisi lain pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

3. Lembaga Perkreditan. Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis perkebunan cukup pegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha



Gambar 2. Rancangan kepemilikan modal pada Model Agroestate berbasis karet
 Figure 2. The design of capital ownership Agro-estate model based on rubber
 (Sumber: Syahza, 2007)



Gambar 3. Model kelembagaan karet berbasis koperasi agribisnis
Figure 3. Institutional model of rubber-based agribusiness cooperative

4. perkebunan. Pada model pemberdayaan ekonomi yang berbasis agribisnis ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).
5. Petani. Kurang berkembangnya kegiatan pertanian yang berbasis agribisnis di pedesaan disebabkan karena beberapa hal, antara lain: tingkat pengetahuan petani, pemilikan modal, tidak adanya kepastian pasar, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi semuanya ini harus melalui suatu organisasi yang mempunyai misi sama. Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah satu jaminan pasar produk pertanian di pedesaan. Oleh karena itu petani harus mengutamakan produksi komoditi unggulan di daerahnya. Petani melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi sebagai penyedia dana. Petani melakukan kegiatan usahataniya didampingi oleh tim ahli yang ditunjuk oleh koperasi. Dengan demikian terjadi hubungan yang erat antara koperasi dan petani. Bentuk mitra usaha ini akan memberikan beberapa keuntungan kepada petani, antara lain; 1) adanya jaminan pasar produk pertanian bagi petani; 2) petani terhindar dari resiko fluktuasi harga; 3) petani mendapat tiga keuntungan, yaitu keuntungan dari hasil penjualan produk pertanian, keuntungan dari pembagian sisa usaha oleh koperasi pada akhir tahun, dan keuntungan dari investasi yang ditanamkan pada koperasi (paket agroestat); dan 4) terjalinnya hubungan kemitraan usaha antara koperasi dan petani.
6. Instansi terkait. Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis agribisnis diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketertuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku agribisnis. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan petani. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.
7. Koperasi sebagai badan usaha. Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar. Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat/mesin pertanian kepada anggota (petani). Dari sisi lain koperasi juga sebagai pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi juga berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Pada koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahatani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakekatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi. Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolahan produk pertanian (agroindustri), mesin dan alat pertanian harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi. Dengan demikian konsep agroestate perkebunan di pedesaan dapat berkembang. Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan

dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

DINAMIKA KELOMPOK KELEMBAGAAN SISTEM AGRIBISNIS KARET

Dinamika kelompok didefinisikan sebagai suatu kelompok yang teratur yang mempunyai hubungan psikologis (yaitu berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama) secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain (Ardianah, et al., 1997). Sedangkan Levis (1996) mendefinisikan dinamika kelompok sebagai kekuatan-kekuatan di dalam suatu kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan perilaku anggota kelompok guna mencapai tujuan kelompok. Dengan demikian, dalam suatu kelompok yang dinamis, akan terjadi interaksi baik sesama anggota kelompok dan interaksi antara kelompok dan ketua kelompok sehingga tujuan kelompok tersebut dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan kelembagaan agribisnis karet, dinamika kelompok-kelompok yang terlibat dalam kelembagaan tersebut berupa interaksi yang terjadi baik antar kelompok maupun anggota kelompok menjadi sangat penting dalam upaya tercapainya sistem kelembagaan yang efektif dan efisien.

Untuk mengetahui keberadaan dinamika kelompok dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, Huraerah dan Purwanto (2006) memformulasikan dimensi-dimensi dari dinamika kelompok, yaitu:

1. Tujuan kelompok; adalah sebagai suatu keadaan di masa mendatang yang diinginkan oleh anggota-anggota kelompok, dan oleh karena itu mereka melakukan berbagai tugas kelompok dalam rangka mencapai keadaan tersebut.
2. Kekompakan kelompok; adalah merupakan tingkat kebersamaan yang menggambarkan keterkaitan anggota kelompok kepada kelompoknya.
3. Struktur kelompok; adalah merupakan pola-pola hubungan diantara berbagai posisi dalam suatu susunan kelompok.
4. Fungsi tugas kelompok; adalah berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan oleh kelompok dalam usaha mencapai tujuan kelompok, sehingga perlu dijelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh kelompok.

5. Pengembangan dan pemeliharaan kelompok; adalah berkaitan dengan apa yang harus ada dalam kelompok.
6. Suasana kelompok; adalah merupakan suasana yang terdapat dalam suatu kelompok sebagai hasil dari berlangsungnya hubungan-hubungan intrapersonal atau hubungan antar anggota kelompok.
7. Efektivitas kelompok; interpetasinya dimana kelompok yang dapat dipandang efektif mempunyai 3 (tiga) aktivitas dasar, yaitu: (a) aktivitas pencapaian tujuan, (b) aktivitas pemeliharaan kelompok secara internal, dan (c) aktivitas mengubah dan mengembangkan cara meningkatkan keefektifan kelompok.
8. Tekanan kelompok (group pressure); yaitu tekanan atau desakan yang berasal dari dalam kelompok itu sendiri.
9. Maksud terselubung (hidden agendas); adalah suatu tujuan anggota kelompok yang terselubung, atau ditutup-tutupi, atau sengaja tidak diberitahukan kepada anggota-anggota kelompok lainnya, dalam melakukan suatu aktivitas tertentu dalam kelompok, karena tujuan sebenarnya dari anggota kelompok tersebut berlawanan dan bertentangan dengan tujuan kelompok yang telah disepakati bersama.

Dinamika kelompok dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Tujuan kelompok

Tujuan kelompok memegang peranan yang sangat penting dalam dinamika kelompok karena berfungsi sebagai: (i) lumbung dari ide yang ingin dilaksanakan; (ii) ikatan jiwa antara anggota kelompok; (iii) Menjadi sasaran dan juga menjadi sumber dari konsep perencanaan kerja; (iv) Menjadi motivasi dalam mengadakan persaingan/aktivitas; (v) Menjadi perangsang untuk mendapatkan kepuasan kerja; dan (vi) Menjadi arah yang tetap dalam menjalankan tugas kelompok.

2. Interaksi

Interaksi antara individu dalam kelompok atau kelompok dengan luar kelompok sangat penting dalam dinamika kelompok. Ada 4 jenis pola interaksi yang terjadi dalam kelompok yaitu: (i) acting, yaitu adanya pembagian tugas terhadap masing-masing individu dalam kelompok; (ii) co-acting, yaitu adanya kerjasama yang erat antar individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan; (iii) interacting, yaitu

adanya kerjasama antara beberapa kelompok pada satu pola kerja yang sama; dan (iv) counter acting, yaitu adanya persaingan dari anggota-anggota kelompok untuk mengatas namakan kelompoknya.

PENUTUP

Sistem agribisnis karet memiliki keterkaitan dan interaksi yang sangat erat antar subsistem yang harus saling mendukung satu sama lain mulai dari subsistem agribisnis hulu (penyediaan benih unggul dan sarana produksi), on farm (manajemen dan pengelolaan perkebunan karet), subsistem agribisnis hilir (pemasaran, perdagangan internasional, pengolahan), maupun subsistem pendukung (pembiayaan/perkreditan, infrastruktur, litbang, kebijakan pemerintah dan lain-lain). Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mempererat interaksi antar subsistem tersebut adalah dengan pola kemitraan sehingga aktivitas dari masing-masing pelaku yang ada dalam sistem agribisnis karet mengarah kepada "symbiosis mutualisme". Selain itu, dinamika yang terjadi dalam kelembagaan harus ditata dengan baik agar setiap pelaku dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga tujuan kelembagaan dalam sistem agribisnis karet dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianah, T., Raharto dan. J.M.M. Aji. 1997. Pengantar Sosiologi. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jember.
- Burhansyah, R dan Azri. 2008. Model pengembangan agribisnis karet di Kabupaten Sekadau. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hayati (Life Sciences)*, Vol. 20, No. 2, hal. 209-218.
- Direktorat Jenderal Perkebunan [Ditjenbun]. 2012. Statistik Perkebunan: Karet. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Goenadi, D.H., M. Supriadi, G. Wibawa, M. Sarjono dan P.U. Hadi. 2007. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Karet. Edisi Kedua. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Huraerah dan Purwanto. 2006. *Dinamika Kelompok: Konsep dan Aplikasi*. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- International Trade Center [Intracen]. 2012. Trademap List: Natual Rubber. International Trade Center.
- Levis, L. 1996. *Komunikasi Penyuluhan Pedesaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahyuti. 2004. Model kelembagaan penunjang pengembangan pertanian di lahan lebak. Disampaikan dalam Workshop Nasional Pengembangan Lahan Rawa Lebak, Balittra, 11 - 12 Oktober 2004.
- Syahza, A. 2007. Percepatan Pemberdayaan Ekonoimi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Syahza, A. 2012. Model pengembangan kelembagaan perkebunan dalam mendukung keberdayaan ekonomi masyarakat. Makalah disampaikan pada Simposium dan Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing dan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perkebunan di Indonesia. Pekanbaru, 4-5 Juli 2012.